



Laporan Evaluasi Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2025



**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA PRABUMULIH**

Jl.Taman Murni NO.46 KM.06

Telp.(0713)-325122

KOTA PRABUMULIH 31117

KATA PENGANTAR

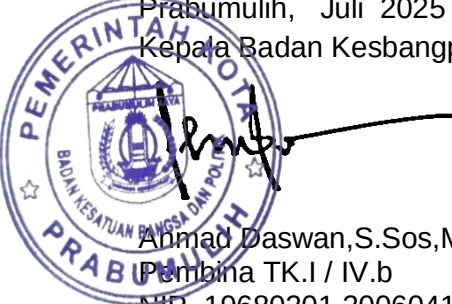
Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kegiatan penyusunan Dokumen Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (BAN.KESBANGPOL) Kota Prabumulih Tahun 2025 dapat diselesaikan.

Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Prabumulih Tahun 2025 ini berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Prabumulih Tahun 2025 , Peraturan Presiden No 33 Tahun 2020 yang ditetapkan pada tanggal 20 februari 2020 tentang standar harga satuan regional dan Berdasarkan Perwako Nomor : 5 /KPTS/BPKAD /2021. Oleh karena itu, penyusunan Rencana Kerja Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025 ini dilaksanakan dengan fokus pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Prabumulih, evaluasi pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Prabumulih tahun 2025 dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Kota Prabumulih Tahun 2024-2026.

Dengan tersusunnya Dokumen Rencana Kerja Perubahan ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan prioritas Tahun 2025 sehingga sasaran yang telah ditetapkan dalam Renja ini dapat terpenuhi.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan dan partisipasinya dalam penyusunan Dokumen RENJA Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Prabumulih tahun 2025.

Prabumulih, Juli 2025
Kepala Badan Kesbangpol,

Anmad Daswan, S.Sos, M.M
Pembina TK.I / IV.b
NIP. 19680201 2006041 008

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 LANDASAN HUKUM	5
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN	7
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN	7
BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN.....	9
2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA KESBANGPOL	9
2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN	17
2.3 EVALUASI HASIL RENJA KESBANGPOL	18
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	28
3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL	28
3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH	29
BAB IV PENUTUP	30
DAFTAR TABEL.....	
2.1 Realisasi keuangan Badan Kesbangpol sampai dengan Triwulan II th 2025	
2.2 Analisa Kinerja Pelayanan	
2.3 Evaluasi Renja Kesbangpol Kota Prabumulih Tahun 2024 sampai dengan Triwulan II	
LAMPIRAN	31
Anggaran Perubahan Sementara Berdasarkan Program Kegiatan (OPD) Tahun 2025	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Perangkat Daerah merupakan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dimana tahapan dan tata cara penyusunan RENJA Perangkat Daerah ini berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renja Perubahan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Selanjutnya Renja Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (KESBANGPOL) Kota Prabumulih Tahun 2025 ini memuat Program dan kegiatan untuk tahun 2025, lokasi Kegiatan, Indikator Kinerja, kelompok sasaran dan pagu indikatif.

Penyusunan Renja Perubahan KESBANGPOL Kota Prabumulih mengacu pada rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra), hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi dan usulan program serta Kegiatan yang berasal dari masyarakat. Renja Perubahan KESBANGPOL Kota Prabumulih Tahun 2025 merupakan penjabaran dari kebijakan dan strategi pembangunan yang termuat dalam RKPD Kota Prabumulih Tahun 2025, yang selanjutnya Renja Perubahan KESBANGPOL ini akan menjadi salah satu acuan dalam proses penyusunan RAPBD yaitu penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perubahan KESBANGPOL Tahun 2025.

Proses penyusunan Rencana Kerja SKPD dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

a. Pembentukan Tim Penyusunan Renja OPD

Anggota Tim Penyusunan Renja OPD merupakan pejabat dan staf OPD yang benar-benar siap dalam hal waktu, dan memiliki kemampuan teknis untuk bertugas secara penuh dalam menyiapkan dokumen Renja OPD.

b. Orientasi mengenai Renja OPD

Orientasi diberikan kepada tim untuk penyamaan persepsi terkait teknis penyusunan Renja Perubahan OPD, hubungan Renja OPD dengan dokumen perencanaan lain, serta mengetahui aspek-aspek regulasi yang terkait dengan perencanaan dan penganggaran daerah.

c. Penyusunan Agenda Kerja

Agenda kerja disusun untuk merinci setiap tahapan kegiatan penyusunan dokumen Renja OPD sampai dengan penetapan dan pengarsipan dokumen Renja. Agenda kerja ini dapat dibuat dalam bentuk bagan alir.

d. Pengumpulan Data dan Informasi

Pengumpulan data dapat dilakukan berdasarkan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Menyusun daftar data/informasi yang dibutuhkan bagi penyusunan Renja OPD dan disajikan dalam bentuk matrik (*check list*) untuk memudahkan analisis;
- 2) Mengumpulkan data atau informasi dari sumber - sumber yang dapat dipertanggungjawabkan;
- 3) Menyiapkan tabel – tabel /matrik kompilasi data yang sesuai dengan kebutuhan analisis.

Berikut adalah bagan alir agenda kerja Tim Penyusunan Rencana Kerja (Renja Perubahan) KESBANGPOL Kota Prabumulih Tahun 2025.

Bagan Alienda Kerja Penyusunan Renja Perubahan Kesatuan Bangsa dan Politik (KESBANGPOL) Kota Prabumulih

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Staf	Kasubbag Program dan Pelaporan	Sekretaris Dinas	Kepala Dinas	Instansi Terkait	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengumpulkan Bahan penyusunan Renja SKPD						Dokumen Arsip	10 hari	bahan penyusunan Renja	
2	Menganalisis data dan informasi Renja yang telah terkumpul						Komputer / Laptop	5 hari	data /bahan penyusunan renja	
3	Membuat konsep rencana kerja (Renja) SKPD						Renstra, Pagu Indikatif, RKPD, IKU, IKK	10 hari	Draft Renja	
4	Mengoreksi konsep dokumen rencana kerja (Renja)						Renstra, Pagu Indikatif, RKPD, IKU, IKK, Komputer	2 hari	Draft Renja	
5	Menyampaikan dokumen rencana kerja kepada Kepala Dinas untuk meminta persetujuan						Draft Renja	2 hari	Draft Renja	
6	Penandatanganan dokumen rencana kerja oleh Kepala Dinas						Draft Renja	2 hari	Draft Renja	
7	Penggandaan dan Pengiriman Renja SKPD						Biaya pengandaan, ATK	1 hari	Dokumen Renja	
8	Pengarsipan		 				Iemari arsip	1 hari	Arsip Renja	

Keterkaitan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (KESBANGPOL) dengan Dokumen Perencanaan Lainnya.

Berikut adalah sinkronisasi perencanaan dan penganggaran berupa alur keterkaitan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional dan Rencana Kerja (Renja) Perubahan KESBANGPOL Keterkaitan dengan Renstra Perangkat Daerah, Rancangan Renja harus berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah yang telah disusun untuk periode 5 (Tahun). Penyusunan Renja harus melihat langkah-langkah strategis apa yang diperlukan agar tujuan tercapai dalam periode 1 (satu) tahun.

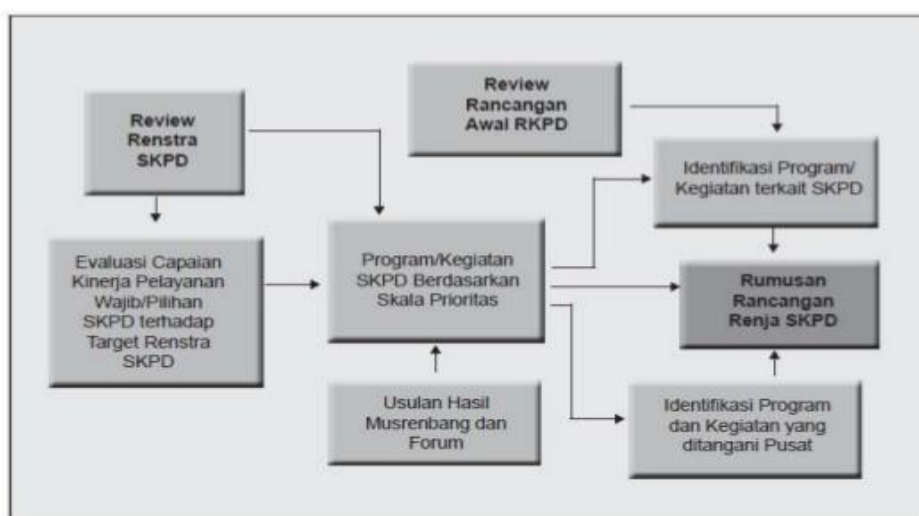
Bagan Alir Proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah

Alur Perencanaan Pembangunan Daerah

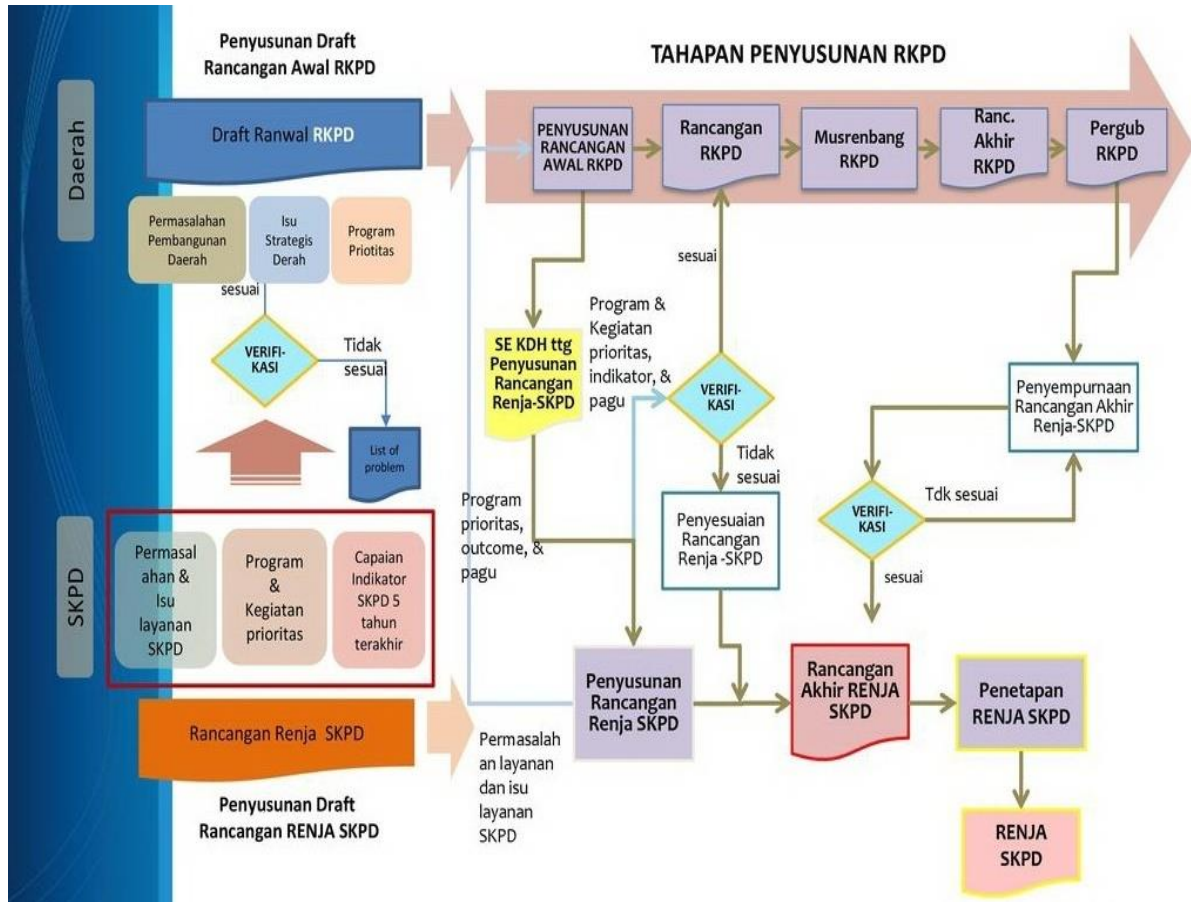


Bagan 1. Alur Perencanaan Pembangunan Daerah Menurut UU 25/2004

Proses Penyusunan Renja SKPD



KETERKAITAN TAHAP PENYUSUNAN RENJA OPD



1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Prabumulih;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Prabumulih Tahun 2024-2026;
15. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Prabumulih;
16. Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 43 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Urusan Pemerintahan Wajib tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar, Dinas Daerah Kota Prabumulih.
17. Surat Walikota Prabumulih Nomor : 123 Tahun 2025 pada tanggal 07 Maret 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Tahun 2025

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renja Kerja Perubahan (RENJA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Prabumulih adalah untuk menentukan arah kebijakan, Program dan Kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi di bidang penunjang urusan pemerintah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Prabumulih.

Tujuan penyusunan RENJA Perubahan adalah:

1. Mengetahui pelaksanaan Program dan Kegiatan tahun 2025;
2. Sebagai media untuk mengukur sumber daya serta kemampuan dalam mencapai pelayanan kinerja melalui evaluasi kinerja;
3. Mewujudkan konsistensi antara perencanaan (*planning*) dan penganggaran (*budgeting*);
4. Sebagai acuan dalam Penyusunan RKA Perubahan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Prabumulih Tahun 2025.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Prabumulih Tahun 2025 disusun menurut sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bagian ini menjelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Renja seperti: **latar belakang** (yang berisi pengertian, proses penyusunan dan keterkaitan dengan dokumen perencanaan lainnya); **landasan hukum** (berisikan undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah dan peraturan lainnya yang menjadi pedoman/acuan dalam penyusunan perencanaan); **maksud dan tujuan** (berisi maksud dan tujuan dari penyusunan Renja) dan **sistematika penulisan** yang menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja OPD.

BAB II : EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAN

Pada bagian ini menjelaskan mengenai Evaluasi Pelaksanaan Renja Perubahan Perangkat Daerah tahun lalu dan Capaian Rensta, analisis kinerja pelayanan OPD, isu-isu penting penyelenggaraan Tugas dan fungsi OPD, dan penelaahan usulan program kegiatan masyarakat.

BAB III : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Menguraikan tentang rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

BAB IV : PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa: catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja KesbangPol dan Capaian Renstra KESBANGPOL

Dalam pelaksanaan penyusunan perencanaan pembangunan Tahun 2025 diperlukan evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perubahan KESBANGPOL dan pencapaian Renstra KESBANGPOL Kota Prabumulih Tahun 2024-2026. Evaluasi Renja tahun 2025 dan capaian Renstra atas pelaksanaan program dan kegiatan KESBANGPOL Kota Prabumulih dimaksud dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan KESBANGPOL Kota Prabumulih.

Anggaran Belanja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (KESBANGPOL) Kota Prabumulih berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA-OPD) Tahun Anggaran 2025 ditetapkan sebesar **Rp.7.871.260.427,-** yang terdiri dari (belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja Hibah). Belanja Operasi Sebesar **Rp.7.843.760.427,-** (Tujuh miliar delapan ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah) dan Belanja Modal **Rp. 27.500.000,- (Dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)**

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/Kabupaten/Kota yang Sudah Terealisasi sebesar Rp. 1.638.832.972,- atau sebesar 39,07%. Program ini terdiri dari Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang telah terealisasi sebesar 5.258.500,- atau sebesar 70,11 %

Kegiatan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah telah terealisasi sebesar 1.433.913.125,- atau sebesar 40,55 %, pada sub kegiatan Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN terealisasi Sebesar Rp. 1.420.833.125,- atau sebesar 40,51 %.

Administrasi Barang Milik Daerah pada perangkat Daerah Terealisasi sebesar Rp. 5.000.000,- atau 41,67 %. Adminstrasi Umum Perangkat Daerah terealisasi sebesar Rp.114.085.207,- sudah mencapai 32,93 %, Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah terealisasi sebesar Rp. 31.152.822,- atau 36,21 %. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Dearah 49.423.318,- atau sebesar 32,62 %

Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Bangsa terealisasi sebesar Rp. 41.487.335,- atau 3,32 %. Program Penngkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik terelalisasi sebesar Rp.1.844.476.628,- atau sebesar 85,01 %. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya terelalisasi sebesar Rp. 27.636.646,- atau sebesar 25,12 %. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial terealisasi sebesar Rp. 46.661.800,- atau sebesar 14, 81 %.

Tabel 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Kesbangpol sampai dengan Triwulan II Tahun 2025

No.	Perangkat Daerah	Urusan /Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan		Penyediaan Dana (Rp)	Realisasi	
					Realisasi anggaran (Rp)	(%)
1	KESBANGPOL	Administrasi Umum Perangkat Daerah				
		1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.500.000	1.254.500	83,63%
		2.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1.500.000	1.343.500	89,57%
		3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-P SKPD	1.500.000	0	0%
		4.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.500.000	1.338.000	89,2%
		5.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.500.000	1.322.500	88,17 %
2	KESBANGPOL	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
		6.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.506.991.713	1.420.833.125	40,51%
		7.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	26.160.000	13.080.000	50%
		8.	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	1.500.000	0	0%
		9.	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	1.500.000	0	0%

		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				
		10.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12.000.000	5.000.000	41,67%
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				
		11.	Pengadaan Pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	25.000.000	0	0%
3	KESBANGPOL	Administrasi Umum Perangkat Daerah				
		12.	Penyediaan bahan / material	24.000.000	14.767.000	61,53%
		13.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	15.000.000	7.145.000	47,63%
		14.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.000.000	3.500.000	50%
		15.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10.000.000	6.923.000	69,23%
		16.	Penyediaan bahan logistik kantor	25.000.000	0	0%
		17.	Fasilitas kunjungan tamu	5.320.000	2.690.000	50,56%
		18.	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah dan dalam daerah	260.130.644	79.060.207	30,39%
4	KESBANGPOL	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
		20.	Pengadaan Sarana dan Prasarana pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	30.000.000	0	0%

		21.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	-.	-	-
5	KESBANGPOL	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
		22.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.000.000	3.840.000	64%
		23.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	44.600.000	819.592.822	43,93%
		24.	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	10.000.000	2.720.000	27,2%
		25.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	25.440.000	5.000.000	19,65%
6	KESBANGPOL	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
		26.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan,pajak dan Perizinan Kendaraan DinasOperasional / Lapangan	121.500.000	49.423.318	40,68%
		27.	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	30.000.000	0	0%
7	KESBANGPOL	<i>Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</i>				
		28.	Pelaksana Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	840.860.000	41.487.335	4,93%
		29.	Pelaksanaan kebijakan dibidang Idiologi Wawasan Kebangsaa, Bela Negara, Karakter Bangsa pembauran Kebangsaan Bhineka	400.000.000	0	0%

			Tunggal Ika			
		30.	Pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan di bidang idiologi wawasan kebangsaan,bela negara	7.000.000	0	0%
8	KESBANGPOL	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik				
		31..	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Penigkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaaan Pemerintah Perwakilan dan Partai Politik , Pemeliharaan umum/Pemilihan Umum Kepada Daerahs, pemantauan Situasi Politik di Daerah	10.000.000	0	0%
		32..	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Penigkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaaan Pemerintah Perwakilan dan Partai Politik , Pemeliharaan umum/Pemilihan Umum Kepada Daerahs, pemantauan Situasi Politik di Daerah	50.000.000	10.271.212	20.54%
		33..	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Penigkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaaan Pemerintah Perwakilan dan Partai Politik , Pemeliharaan umum/Pemilihan Umum Kepada Daerahs, pemantauan Situasi Politik di Daerah	2.094.611.274	1.831.805.416	87,45%
		33.	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Penigkatan Demokrasi, Fasilitasi	15.000.000	2.400.000	16%

			Kelembagaan Pemerintah Perwakilan dan Partai Politik , Pemeliharaan umum/Pemilihan Umum Kepada Daerahs, pemantauan Situasi Politik di Daerah			
9	KESBANGPOL	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan				
		34.	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	74..000.000	0	0%
		35.	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	7.000.000	0	0%
10	KESBANGPOL	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi sosial dan budaya				
		36.	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Keamanan Umat Beragama dan Pengganut Kepercayaan Daerah	110.000.000	27.636.646	25,12%
11	KESBANGPOL	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial				
		37.	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Pembatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	100.000.000	6.078.300	25,71%

		38.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Pembatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	15.000.000	3.796.000	25,31%
		39.	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA)	200.000.000	36.787.500	18,39%
JUMLAH				8.118.113.631,-	340.267.841,-	4,17 %

Tabel 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan

Tujuan / Sasaran	Indikator	Target Renstra						Realisasi				
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani, Efektif, Efisien, dan Bersih	Nilai SAKIP	CC	B	B	BB	BB	BB	C	CC	B	BB	BB
	Persentase Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan	100	100	100	100	100	100%	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %
Terlaksananya Reformasi Birokrasi Kota Prabumulih	Jumlah konflik sosial	< 7	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	3 kali laporan / 5 kejadian	3	3	3

Tabel 2.3 Evaluasi Hasil Renja (KESBANGPOL) Tahun 2025 sampai dengan Triwulan II

LAPORAN EVALUASI KERJA PROGRAM / KEGIATAN
KOTA PRABUMULIH TAHUN ANGGARAN 2025
S/D BULAN JUNI 2025

KODE	NAMA PROGRAM / KEGIATAN	ANGGAR AN	BOBOT	TARGE T KINERJ A 1 TAHUN	KEUANGAN					FISIK			TOTAL KINERJA S/D BULAN JUNI	CAPAIA N	KENDAL A
					T		R		K	T	R	K			
					Rp	%	Rp	%		%	%				
1	2	3	4	5=4*10 0	6	7=6/3* 100	8	9=8/3* 100	10=9*4* 0,5	11	12	13=12* 4*0,5	14=10+1 3	15=14/ 5*100	16
1.5.5	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8,118,11 3,631	0.0068	0.68	3,648,305, 922	44.94	3,599,09 5,381	44.33	0.15028	0	31.82	0.1078 6	0.25814	38.07	
1.5 1.5.5 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHA N DAERAH KABUPATEN/K OTA	4,194,64 2,357	0.5167	51.67	1,668,632, 972	39.78	1,638,83 2,972	39.07	10.09377	0	40	10.334 03	20.4278	39.54	
1.5 1.5.5 1.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7,500,00 0	0.0018	0.18	5,258,500	70.11	5,258,50 0	70.11	0.06268	0	70.6	0.0631 2	0.1258	70.36	

1.5 1.5.5 1.2.01.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1,500,000	0.2	20	1,254,500	83.63	1,254,500	83.63	8.363	0	84	8.4	16.763	83.81	
1.5 1.5.5 1.2.01.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1,500,000	0.2	20	1,343,500	89.57	1,343,500	89.57	8.957	0	90	9	17.957	89.78	
1.5 1.5.5 1.2.01.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1,500,000	0.2	20	-	0	-	0	0	0	0	0	0	0	
1.5 1.5.5 1.2.01.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1,500,000	0.2	20	1,338,000	89.2	1,338,000	89.2	8.92	0	90	9	17.92	89.6	
1.5 1.5.5 1.2.01.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1,500,000	0.2	20	1,322,500	88.17	1,322,500	88.17	8.817	0	89	8.9	17.717	88.58	
1.5 1.5.5 1.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3,536,151,713	0.843	84.3	1,433,913,125	40.55	1,433,913,125	40.55	17.09215	0	23	9.69469	26.78684	31.77	
1.5 1.5.5 1.2.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3,506,991,713	0.9918	99.18	1,420,833,125	40.51	1,420,833,125	40.51	20.08797	0	41	20.33095	40.41892	40.75	
1.5 1.5.5 1.2.02.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan	26,160,000	0.0074	0.74	13,080,000	50	13,080,000	50	0.18495	0	51	0.18865	0.3736	50.5	

	SKPD														
1.5 1.5.5 1.2.02.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1,500,00 0	0.0004	0.04	-	0	-	0	0	0	0	0	0	0	
1.5 1.5.5 1.2.02.7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwula nan/Semestera n SKPD	1,500,00 0	0.0004	0.04	-	0	-	0	0	0	0	0	0	0	
1.5 1.5.5 1.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	12,000,0 00	0.0029	0.29	5,000,000	41.67	5,000,00 0	41.67	0.0596	0	42	0.0600 8	0.11968	41.83	
1.5 1.5.5 1.2.03.6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12,000,0 00	1	100	5,000,000	41.67	5,000,00 0	41.67	20.835	0	42	21	41.835	41.84	
1.5 1.5.5 1.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	25,000,0 00	0.006	0.6	-	0	-	0	0	0	0	0	0	0	
1.5 1.5.5 1.2.05.2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	25,000,0 00	1	100	-	0	-	0	0	0	0	0	0	0	
1.5 1.5.5 1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	346,450, 644	0.0826	8.26	114,085,20 7	32.93	114,085, 207	32.93	1.3599	0	44.71	1.8463 8	3.20628	38.82	

1.5 1.5.5 1.2.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor	7,000,00	0.0202	2.02	3,500,000	50	3,500,00 0	50	0.50512	0	51	0.5152 2	1.02034	50.5	
1.5 1.5.5 1.2.06.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10,000,00	0.0289	2.89	6,923,000	69.23	6,923,00 0	69.23	0.99913	0	70	1.0102 4	2.00937	69.61	
1.5 1.5.5 1.2.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25,000,00	0.0722	7.22	-	0	-	0	0	0	0	0	0	0	
1.5 1.5.5 1.2.06.5	Penyediaan Barang Cetak an dan Penggandaan	15,000,00	0.0433	4.33	7,145,000	47.63	7,145,00 0	47.63	1.0311	0	48	1.0391 1	2.07021	47.82	
1.5 1.5.5 1.2.06.7	Penyediaan Bahan/Material	24,000,00	0.0693	6.93	14,767,000	61.53	14,767,00 00	61.53	2.13121	0	62	2.1474 9	4.2787	61.76	
1.5 1.5.5 1.2.06.8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	5,320,00 0	0.0154	1.54	2,690,000	50.56	2,690,00 0	50.56	0.38819	0	51	0.3915 7	0.77976	50.78	
1.5 1.5.5 1.2.06.9	Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	260,130,644	0.7508	75.08	79,060,207	30.39	79,060,207	30.39	11.40909	0	31	11.63809	23.04718	30.7	
1.5 1.5.5 1.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	30,000,00	0.0072	0.72	-	0	-	0	0	0	0	0	0	0	
1.5 1.5.5 1.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung	30,000,00	1	100	-	0	-	0	0	0	0	0	0	0	

	Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
1.5 1.5.5 1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	86,040,000	0.0205	2.05	31,152,822	36.21	31,152,822	36.21	0.37137	0	39.75	0.40767	0.77904	37.98	
1.5 1.5.5 1.2.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6,000,000	0.0697	6.97	3,840,000	64	3,840,000	64	2.23152	0	65	2.26639	4.49791	64.5	
1.5 1.5.5 1.2.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	44,600,000	0.5184	51.84	19,592,822	43.93	19,592,822	43.93	11.38586	0	46	11.92236	23.30822	44.97	
1.5 1.5.5 1.2.08.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10,000,000	0.1162	11.62	2,720,000	27.2	2,720,000	27.2	1.58066	0	28	1.62715	3.20781	27.6	
1.5 1.5.5 1.2.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	25,440,000	0.2957	29.57	5,000,000	19.65	5,000,000	19.65	2.90502	0	20	2.95676	5.86178	19.82	
1.5 1.5.5 1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	151,500,000	0.0361	3.61	79,223,318	52.29	49,423,318	32.62	0.58908	0	20.5	0.3702	0.95928	26.56	
1.5 1.5.5 1.2.09.09	Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	30,000,000	0.198	19.8	29,800,000	99.33	-	0	0	0	0	0	0	0	

1.5 1.5.5 1.2.09.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	121,500,000	0.802	80.2	49,423,318	40.68	49,423,318	40.68	16.31228	0	41	16.44059	32.75287	40.84	
8.1 1.5.5 2	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	1,247,860,000	0.1537	15.37	56,420,876	4.52	41,487,335	3.32	0.25516	0	1.67	0.12835	0.38351	2.5	
8.1 1.5.5 2.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1,247,860,000	1	100	56,420,876	4.52	41,487,335	3.32	1.66	0	1.67	0.835	2.495	2.5	
8.1 1.5.5 2.2.01.3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal	400,000,000	0.3205	32.06	-	0	-	0	0	0	0	0	0	0	

	Ika dan Sejarah Kebangsaan														
8.1 1.5.5 2.2.01.4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	840,860, 000	0.6738	67.38	56,420,876	6.71	41,487,3 35	4.93	1.66102	0	5	1.6846	3.34562	4.96	
8.1 1.5.5 2.2.01.5	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (BADAN KESATUAN BANGSA DAN	7,000,00 0	0.0056	0.56	-	0	-	0	0	0	0	0	0	0	

	POLITIK)														
8.1 1.5.5 3	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANG AN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	2,169,61 1,274	0.2673	26.73	1,844,476, 628	85.01	1,844,47 6,628	85.01	11.3597	0	31.5	4.2092 8	15.56898	58.25	
8.1 1.5.5 3.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilih an Umum Kepala Daerah, serta	2,169,61 1,274	1	100	1,844,476, 628	85.01	1,844,47 6,628	85.01	42.505	0	31.5	15.75	58.255	58.26	

	Pemantauan Situasi Politik														
8.1 1.5.5 3.2.01.1	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	10,000,000	0.0046	0.46	-	0	-	0	0	0	0	0	0	0	
8.1 1.5.5 3.2.01.3	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik,	50,000,000	0.023	2.31	10,271,212	20.54	10,271,212	20.54	0.23668	0	21	0.24198	0.47866	20.77	

	Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah														
8.1 1.5.5 3.2.01.4	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	2,094,611,274	0.9654	96.54	1,831,805,416	87.45	1,831,805,416	87.45	42.2135	0	88	42.47899	84.69249	87.73	
8.1 1.5.5 3.2.01.5	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik,	15,000,000	0.0069	0.69	2,400,000	16	2,400,000	16	0.05531	0	17	0.05877	0.11408	16.5	

	Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah														
8.1 1.5.5 4	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	81,000,000	0.01	1	4,477,000	5.53	-	0	0	0	0	0	0	0	
8.1 1.5.5 4.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	81,000,000	1	100	4,477,000	5.53	-	0	0	0	0	0	0	0	

8.1 1.5.5 4.2.01.3	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	74,000,000	0.9136	91.36	4,477,000	6.05	-	0	0	0	0	0	0	0	
8.1 1.5.5 4.2.01.5	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	7,000,000	0.0864	8.64	-	0	-	0	0	0	0	0	0	0	
8.1 1.5.5 5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN	110,000,000	0.0135	1.35	27,636,646	25.12	27,636,646	25.12	0.17019	0	26	0.17615	0.34634	25.56	

	EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA														
8.1 1.5.5 5.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	110,000, 000	1	100	27,636,646	25.12	27,636,6 46	25.12	12.56	0	26	13	25.56	25.56	
8.1 1.5.5 5.2.01.4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	110,000, 000	1	100	27,636,646	25.12	27,636,6 46	25.12	12.56	0	26	13	25.56	25.56	
8.1 1.5.5 6	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN	315,000, 000	0.0388	3.88	46,661,800	14.81	46,661,8 00	14.81	0.28733	0	17.33	0.3362 2	0.62355	16.07	

	KONFLIK SOSIAL														
8.1 1.5.5 6.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	315,000,000	1	100	46,661,800	14.81	46,661,800	14.81	7.405	0	17.33	8.665	16.07	16.07	
8.1 1.5.5 6.2.01.4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	100,000,000	0.3175	31.75	6,078,300	6.08	6,078,300	6.08	0.96508	0	7	1.11111	2.07619	6.54	

8.1 1.5.5 6.2.01.5	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	15,000,000	0.0476	4.76	3,796,000	25.31	3,796,000	25.31	0.60262	0	26	0.61905	1.22167	25.66	
8.1 1.5.5 6.2.01.6	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	200,000,000	0.6349	63.49	36,787,500	18.39	36,787,500	18.39	5.8381	0	19	6.03175	11.86985	18.7	

BAB III

Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Telaan Renstra Kementerian Dalam Negeri Tahun 2024-2026 khusus Direktorat Jenderal Politik Dan Pemerintahan Umum yang telah merencanakan Program Pembinaan Politik Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dengan Sasaran Program, Yaitu :

- 1) Meningkatnya ketahanan dan kewaspadaan ideologi, wawasan kebangsaan, ekonomi dan sosial budaya.
- 2) Terpeliharanya kerukunan komponen bangsa guna mewujudkan stabilitas keamanan dalam negeri.
- 3) Mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila.

Untuk mendukung Sasaran Program Pertama dengan Sasaran Kegiatan Penurunan jumlah peristiwa gangguan keamanan dalam negeri berlatar belakang ideologi radikal, isu separatisme, sumber daya ekonomi (sengketa lahan dan sumber daya alam). Badan Kesbangpol Kota Prabumulih akan memperkuat koordinasi dengan berbagai Unsur Intelejen dari berbagai Instansi baik Sipil maupun Militer, diantaranya Unsur Badan Intelejen Daerah (BINDA) Kota Prabumulih, Kasi Intel Kejaksaa Negeri Kota Prabumulih, Kasat Intelkam Polres Kota Prabumulih, BAIS TNI AD, Intel Kodim dan Koramil serta unsur lainnya yang berhubungan dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Dengan Implementasinya melalui kegiatan Tim Kewaspadaan Dini Daerah, Tim Satgas Narkoba dan Penyakit Masyarakat serta Kegiatan Koordinasi Terpadu Gangguan Keamanan.

Untuk mendukung Sasaran Program Terpeliharanya kerukunan komponen bangsa guna mewujudkan stabilitas keamanan dalam negeri dengan Sasaran Kegiatan Jumlah konflik berlatar belakang isu SARA, akan didukung dengan Kegiatan Peningkatan Kesadaran Bela Negara dan Pencapaian Kapasitas dan Kelembagaan Forum Kerukunan Antar Umat Beragama (FKUB) kota Prabumulih.

Untuk mendukung Sasaran Program Mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan Sasaran Kegiatan Prosentase partisipasi politik dalam penyelenggaraan pemilu, akan dilaksanakan kegiatan Pembinaan / Penyuluhan etika dan budaya Politik yang diadakan untuk meningkatkan partisipasi politik pada masyarakat.

Telaahan Terhadap Kebijakan Provinsi Telaahan terhadap Renstra Kesbangpol Provinsi Sumatera Selatan tentang menurunnya pemahaman Pancasila sebagai dasar dan Ideologi negara serta menurunnya kesadaran bela negara dimasyarakat. Untuk mendukung sasaran program tersebut, Badan Kesbangpol Kota Prabumulih mempunyai keterkaitan kegiatan Peningkatan Kesadaran Bela Negara (PKBN) dengan mengadakan Pelatihan dan Pembinaan kesadaran bela negara bagi kaum perempuan dan Pokja PKK di Wilayah Kota Prabumulih serta diimplementasikan dengan pengiriman peserta Bela Negara ke Provinsi Sumatera Selatan demi penguatan Revolusi Mental di Daerah

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran dalam Isu-Isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah sebagai berikut :

No	Tujuan	Sasaran
1.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani, Efektif, Efisien, dan Bersih	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan
2	Terlaksananya Reformasi Birokrasi Kota Prabumulih	Menurunnya jumlah konflik sosial yang ada dikota Prabumulih

BAB IV PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Prabumulih Tahun 2025 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Rencana Strategis KESBANGPOL Kota Prabumulih Tahun 2024 – 2026 dalam menunjang tercapainya visi dan misi Kota Prabumulih serta target dan sasaran pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Kota Prabumulih Tahun 2025.

Rencana kerja perubahan inidigunakan sebagai bahan dalam forum OPD dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari APBD Tahun 2025 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2025

Kepala Badan Kebangpol



Ahmad Daswan, S.Sos, M.M
Pembina TK. I - IV.b
NIP. 19680201 200604 1 008

Lampiran : Anggaran Perubahan Sementara Berdasarkan Program Kegiatan (OPD) Tahun 2025
Kota Prabumulih

Nama Opd : **BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**
Urusan /
Kode : **(1) URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**
Bidang Urusan / Kode :

Program	Kegiatan	Kode Sub kegiatan	Sub kegiatan	Sasaran	Target	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah / Berkurang
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK						8,118,113.631	7.661.260.427	456,853,204
						4,194,642,357	4,055,513,385	139,128,972
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah					7,500,000	6,750,000	7,493,250
		x.xx.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Rencana Kerja (Renja) dan (Renja Perubahan) SKPD	3 dok	1,500,000	1,350,000	150,000
		x.xx.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKAP-SKPD	Tersedianya Dokumen RKA-P	1 dok	1,500,000	1,350,000	150,000
		x.xx.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen Rencana Kerja Anggaran SKPD	1 dok	1,500,000	1,350,000	150,000
		x.xx.01.2.01.06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Iktiisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	1,500,000	1,350,000	150,000
		x.xx.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan evaluasi kiner perangkat daerah , Dokumen Perjanjian Kinerja	1 Laporan	1,500,000	1,350,000	150,000
	Administrasi keuangan Perangkat Daerah	x.xx.01.2.02.01				3,536,151,713	3.535,371,713	780,000

			Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan AN	27 Org/bln	3,506,991,713	3,506,991,713	0
		x.xx.01.2.02.03	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian / verifikasi keuangan SKPD	Penyediaan jasa keuangan	12 dokumen	26,160,000	26,160,000	0
		x.xx.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan akhir tahunSKPD	Tersedianya Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	1 Laporan	1,500,000	1,110,,000	390,000
		x.xx.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan bulanan / triwulan / semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	1 Laporan	1,500,000	1,110,,000	390,000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah					86.040.000	85.937.950	102,050
		x.xx.01.2.08.01	Penyediaan jasa surat menyurat	tersedianya jasa surat menyurat selama satu tahun	12 Laporan	6.000,000	6,000,000	0
		x.xx.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, listrik selama satu tahun	12 Laporan	44.600.000	44.563.950	36,050
		x.xx.01.2.08.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya pemeliharaan rutin alat kantor	12 Laporan	10,000,000	9,934,000	66,000
		x.xx.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	25.440.000	25.440.000	0
	Administrasi Umum Perangkat Daerah					346,450,664	209,408,722	137,041,922
		x.xx.01.2.06.07	Penyediaan bahan / material	Tersedianya alat tulis kantor selama satu tahun	25 Paket	24,000,000	21,600,000	2,400,000
		x.xx.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang cetakan dan penggandaan	12 Paket	15,000,000	13,499,700	1,500,300

		x.xx.01.2.06.09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah pegawai memenuhi undangan rapat-rapat koordinasi ke luardan dalam daerah	12 Laporan	260,130,644	130,025,822	130,104,822
		x.xx.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Surat kabar atau majalah selama satu tahun	0	0	0	0
		x.xx.01.2.06.08	Fasilitasi kunjungan tamu	Tersedianya tamu selama satu tahun	12 Laporan	5.320.000	4.784.000	536,000
		x.xx.01.2.06.04	Penyediaan bahan logistik kantor	Tersedianya Makanan dan minuman rapat selama satu tahun	12 Paket	25,000,000	22,499,200	2,500,800
		x.xx.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tanggga selama satu tahun	20 Paket	10,000,000	10,000,000	0
		x.xx.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Peralatan listrik	6 Paket	7.000,000	7.000,000	0
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Ueusan Pemerintahan Daerah					151,500,000	151.485.000	15,000,000
		x.xx.01.2.09.02	Penyediaan jasa pemeliharaan , biaya pemeliharaan , pajak pemeliharaan , pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Tersedianya jasa Perawatan kendaraan dinas roda 4 (2 unit) dan roda 2 (5 unit) selama satu tahun	17 unit	121,500,000	121,500,000	0
		x.xx.01.2.09.09	Pemeliharaan / rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Tersedianya pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	1 Unit	30.000.000	29.985,000	15,000

	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah					30,000,000	30,000,000	0
		x.xx.01.2.07.09	Pengadaansarana dan Prasarana pendukung gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Tersedianya Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	1 Unit	30,000,000	30,000,000	0
		x.xx.01.2.07.09	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Tersedianya Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional				
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					25,000,000	25,000,000	0
		x.xx.1.2.05.02	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	umlah pengadaan pakaian olahraga dan sepatu olahraga	45 Paket	25,000,000	24,560,000	440,000
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					12,000,000	12,000,000	0
		x.xx.01.2.03.06	Pelaksanaan penatausahaan BMD pada SKPD	honorarium pengelola barang daerah	12 Laporan,	12,000,000	12,000,000	0
Program Penguatan Idiologi Pancasila dan Karakter Bangsa						1.247.360.000	1,202.140,000	45,720,000
		8.01.02.2.01.03	Pelaksanaan kebijakan dibidang Idiologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	60 orang	400.000,000	398,855,,000	1,145,000

	rakor dan dialog kebangsaan dengan Tomas, Toga, ASN dan Masyarakat, Pelatihan dan Pembinaan kesadaran bela negara, Jumlah fasilitasi kampanye Nasional terkait revolusi mental dan restorasi sosial, Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa dengan penyelenggaraan (HUT RI dan HUT Kota)	8.01.02.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah orang yang mengikuti koordinasi di bidang ideologi pancasila dan karakter kebangsaan Kegiatan PPWK, Laporan Bela Negara, Lapoaran Penguatan Wasbang	172 orang	840.860.000	798,511.000	42,349,000
						2,169,611,274	2,047,892,874	121,718,400
Program Peningkatan Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Politik dan Pengembangan dan Etika serta Budaya Politik	Penyusunan data dan informasi partai politik	8.01.03.2.01.01	Penyusunan Program kerja di bidang politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, Fasilitasi kelembagaan Pemerintah, perwakilan dan partai politik pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di daerah	Jumlah dokumen program kerja di bidangbidang politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum / pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah Kegiatan Penyusunan Data Base Partai Politik	1 dokumen	10,000,000	5,836,800	4,163,200

	Pembinaan / Penyuluhan etika dan budaya Politik.	8.01.03.2.01.03	Pelaksanaan kebijakandi bidang politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, Fasilitasi kelembagaan Pemerintah, perwakilan dan partai politik pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di daerah	Jumlah kebijakan di bidang bidang politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum / pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik didaerah kegiatan Penyuluhan Etika dan Budaya Politik	50 orang	50,000,000	19,591,600	30,408,000
	Jumlah Parpol yang mendapatkan bantuan keuangan dan peningkatan kapasitas	8.01.03.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi dibidang politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, Fasilitasi kelembagaan Pemerintah, perwakilan dan partai politik pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di daerah	Jumlah orang yang mengikuti koordinasi di bidang politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum / pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik didaerah kegiatan Verifikasi Bantuan Keuangan Partai Politik	558 orang	2.094,611,274	2,014,939,074	79,672,200

	Monev Parpol	8.01.03.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, Fasilitasi kelembagaan Pemerintah, perwakilan dan partai politik pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di daerah	Jumlah laporan hasil monitoring evaluasi dan pelaporan di bidang politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum / pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah Kegiatan monitoring dan evaluasi	1 Laporan	15,000,000	7,525,400	7,474,600
						81,000,000	42,461,200	38,538,800
Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Rapat Kerja dan jumlah Surat Rekomendasi yang dikeluarkan Kesbangpol, Pembinaan dan Revitalisasi Ormas, Pelatihan bela negara, Jumlah Surat Keterangan Penelitian (SKP) yang direkomendasi	8.01.04.2.01.03	Pelaksanaan kebijakan dibidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah	Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah kegiatan Verifikasi Administrasi Ormas dan Revitalisasi Ormas, Surat Keterangan Penelitian yang direkomendasi	300 Orang	74,000,000	38,562,200	35,437,800

	Monev penyusunan kinerja Ormas /LSM , Pengawasan	8.01.04.2.01.04	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan dibidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah	Jumlah laporan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Kegiatan Monitoring, tersedia data ormas/ LSM dan nirlaba lainnya	1 Laporan	7,000,000	3,899,000	3,101,000
Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya						110,000.000	60,300,118	49,699,882
	Rapat kerja bersama antar pemeluk agama dan dialog bersama FKUB dan Kajian Kerukunan Umat Beragama	8.01.05.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi dibidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalagunaan narkoba, vasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah	Jumlah orang yang mengikuti koordinasi di bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah kegiatan Koordinasi Antar FKUB	300 orang	110,000,000	60,300,118	49,699,882

		8.01.05.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan dibidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalagunaan narkoba, vasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Monitoring Evaluasi dan Pelaporan dibidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalagunaan narkoba, vasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah				
						315,000,000	252,952,850	57,047,150
Program Peningkatan Nasional dan Peningkatan Kualitas Vasilitasi penanganan Konflik Sosial	Pembentukan Satgas Kntelijen di 37 kel / desa	8.01.06.2.01.03	Pelaksanaan Koordinasi dibidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan di bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di daerah	jumlah orang yang mengikuti koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing. Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Kegiatan koordinasi Tim Kewaspadaan dini Tim gangguan keamanan	75 Orang	100,000,000	74,117,700	25,882,300

	Penyusunan Data dan Infomasi Rencana Aksi Deteksi Dini potensi konflik	8.01.06.2.01.04	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan dibidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan di bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di daerah	Jumlah laporan hasil monitoring ,evaluasi dan pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing. Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Kegiatan monitoring	1 lap	15,000,000	8,317,100	6,682,900
	Rapat Forkominda	8.01.06.2.01.06	Pelaksanaan forum koordinasi Pimpinan Daerah Kota	Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan forum koordinasi Pimpinan Daerah Kota	1 Dok	200,000,000	170,518,050	29,481,950

Kepala Badan Kebangpol



Ahmad Daswan, S.Sos, M.M
Pembina TK.I - IV.b
NIP 19680201 200604 1 008